

Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Melalui Penatausahaan Keuangan yang Efektif di BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah

Hendarto^{1*}, Kristian H.P Lambe², Baharuddin³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar

E-mail:

hendhar03@gmail.com^{1*}

Penulis korespondensi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan kualitas laporan keuangan melalui penatausahaan keuangan yang efektif di BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, melibatkan enam informan kunci. Analisis dilakukan dengan metode triangulasi untuk meningkatkan validitas hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan mencakup tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, pengendalian internal, penyusunan laporan, pemantauan realisasi, serta evaluasi dan perbaikan rutin. Penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meskipun masih terdapat kendala dalam konsistensi implementasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan meliputi penguatan kapasitas SDM bidang keuangan, pemanfaatan teknologi berbasis data, penguatan pengendalian internal, peningkatan koordinasi antar unit, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan audit internal secara periodik. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang efektif sebagai fondasi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah daerah.

Kata kunci: strategi, penatausahaan keuangan, laporan keuangan, akuntabilitas, transparansi.

Abstract: This study aims to analyze strategies for improving the quality of financial reports through effective financial administration at BAPPERIDA of Central Papua Province. A qualitative descriptive approach was employed, using observation, interviews, and documentation with six key informants. Data were analyzed through triangulation to enhance validity. The findings reveal that financial administration covers budget planning and preparation, transaction recording, internal control, financial report preparation, monitoring and evaluation, and routine process improvements. The preparation of financial reports has complied with the principles of transparency and accountability under Government Regulation No. 12/2019 on Regional Financial Management, although challenges remain regarding implementation consistency and limited human resource capacity. Recommended strategies include strengthening financial human resource capacity, adopting data-driven technology, reinforcing internal controls, improving inter-unit coordination, and conducting regular monitoring, evaluation, and internal audits. The study highlights that effective financial administration is a key foundation for enhancing accountability, transparency, and the overall quality of financial reporting in local government institutions.

Keywords: strategy, financial administration, financial reporting, accountability, transparency.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan aspek krusial dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi publik. Penelitian sistematis menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi, standar akuntansi sektor publik, serta tata kelola keuangan yang kuat mampu membentuk praktek pelaporan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Jannah, Haliah, & Nirwana, 2025).

Studi Empiris juga mengungkap bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Good Governance, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAKD), pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan determinan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah (Setiyawati & Doktoralina, 2021; Jouali et al., 2024).

Selain itu, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan, meskipun tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan infrastruktur tetap ada (Oktaviani et al., 2024).

Tabel 1. Fakta Pendukung Tren Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
Fenomena/Isu	Data/Temuan Terkini
Digitalisasi & akuntansi sektor publik	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Jannah et al., 2025)
Determinan kualitas laporan keuangan daerah	SDM, good governance, SAKD, kontrol internal, TI (Setiyawati & Doktoralina, 2021)
SIPD dan digital governance	Efisiensi & akurasi meningkat; tantangan infrastruktur dan budaya (Oktaviani et al., 2024)

Sumber: Penelitian terdahulu (2025)

Urgensi Penelitian

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa meskipun terdapat kemajuan melalui penerapan SIPD dan prinsip tata kelola keuangan yang baik, masih terdapat celah dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur TI, dan konsistensi pelaksanaan kontrol internal. Temuan ini menegaskan pentingnya penelitian lebih lanjut yang fokus pada strategi peningkatan kualitas pelaporan keuangan lokal melalui penguatan SDM, penguatan kontrol internal, serta pemanfaatan teknologi—agar tercapai akuntabilitas dan transparansi yang optimal pada pemerintah daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan urgensi tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi saat ini terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus: BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah)?
2. Faktor-faktor apa saja (SDM, teknologi, kontrol internal, koordinasi antar-unit) yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah?
3. Strategi apa yang paling efektif dikembangkan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah?

TINJAUAN LITERATUR

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan sektor publik merefleksikan sejauh mana laporan mampu menyediakan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2020), kualitas laporan keuangan ditentukan oleh relevansi, keandalan, keterbandingan, dan konsistensi. Dalam konteks pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan (Arsal et al., 2020). Penelitian terbaru menekankan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor kompetensi SDM, efektivitas pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta kepatuhan terhadap regulasi akuntansi (Setiyawati & Doktoralina, 2021; Jouali et al., 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan juga alat akuntabilitas publik.

Penatausahaan Keuangan

Penatausahaan keuangan merupakan serangkaian proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan secara sistematis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pengelolaan ini diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta SAP berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Tujuannya adalah memastikan bahwa anggaran dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel (Soeharto, 2022). Beberapa penelitian menggarisbawahi bahwa

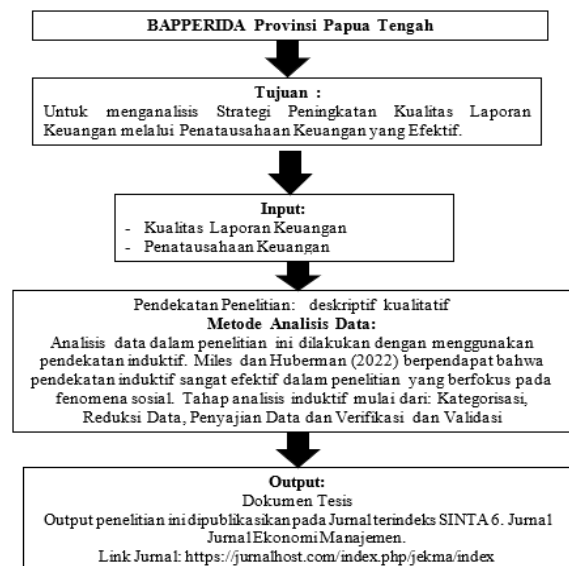
keberhasilan penatausahaan keuangan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan kompetensi aparatur. Oktaviani et al. (2024) menegaskan bahwa penerapan *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)* meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan, namun keterbatasan infrastruktur dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi tantangan signifikan. Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal berperan penting dalam meminimalkan risiko penyimpangan dan meningkatkan keandalan laporan keuangan (Sutrisno, 2022).

Efektivitas

Efektivitas dalam konteks penatausahaan keuangan dimaknai sebagai keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Robbins & Judge (2020) mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan organisasi mencapai tujuan “dengan cara yang tepat dan benar.” Efektivitas manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah diukur dari ketepatan waktu, akurasi pencatatan, serta kepatuhan pada peraturan (Akinboade & Kinfack, 2020). Penelitian mutakhir menekankan bahwa efektivitas penatausahaan keuangan akan berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik. Peningkatan efektivitas dapat dicapai melalui penguatan koordinasi antarunit kerja, penerapan evaluasi rutin, serta pemanfaatan teknologi berbasis data untuk mendukung transparansi dan kecepatan dalam proses pencatatan (Kuipers, 2021; Chandra & Patel, 2022).

Alur Pikir Penelitian

Selanjutnya Alur pikir penelitian ini disusun sebagai berikut:



Sumber: Penulis (2025)

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena strategi peningkatan kualitas laporan keuangan melalui penatausahaan keuangan yang efektif di BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, perspektif, serta pengalaman para informan secara lebih komprehensif dan kontekstual (Creswell & Poth, 2018). Dengan desain deskriptif kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, interaksi, serta praktik penatausahaan keuangan dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Populasi penelitian ini mencakup seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan di BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah. Dari populasi tersebut, dipilih enam orang informan yang mewakili berbagai posisi strategis, yaitu kepala bidang, staf pelaksana keuangan, pejabat penyusun laporan keuangan, serta auditor dan pengawas internal. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik **purposive sampling**, yakni penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama relevansi pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam penatausahaan keuangan (Patton, 2015). Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan**

Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Papua Tengah, yang merupakan instansi pemerintah daerah dengan fungsi utama dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran. Penelitian dilaksanakan pada tahun **2024 hingga awal 2025**, bertepatan dengan fase awal konsolidasi kelembagaan pasca terbentuknya Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Kondisi ini memberikan konteks unik terkait dinamika pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan di instansi yang masih membangun sistem administrasi keuangan secara bertahap.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi**. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan para informan mengenai praktik penatausahaan dan strategi peningkatan kualitas laporan keuangan. Observasi dilakukan untuk memahami proses yang berlangsung sehari-hari dalam pengelolaan anggaran dan pencatatan transaksi. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan, peraturan internal, serta arsip keuangan yang relevan. Kombinasi teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan triangulatif mengenai objek penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018).

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik **analisis data kualitatif berbasis triangulasi**. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Triangulasi digunakan untuk menguji validitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, metode, maupun perspektif teori. Pendekatan ini memungkinkan hasil penelitian menjadi lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan (Flick, 2018). Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menghasilkan deskripsi fenomena, tetapi juga menawarkan strategi praktis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penatausahaan keuangan yang efektif di lingkungan pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden penelitian ini berjumlah enam orang yang dipilih secara purposif, mewakili pihak internal dan eksternal yang berperan dalam penatausahaan keuangan di BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah. Tabel berikut menyajikan profil responden:

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

Kode Informan	Jabatan/Posisi	Peran dalam Penatausahaan Keuangan	Lama Bekerja	Keterangan
R1	Kepala Bidang Perencanaan	Koordinasi perencanaan anggaran dan alokasi dana	10 tahun	Internal
R2	Staf Keuangan (Pelaksana)	Pencatatan transaksi dan pengelolaan administrasi	5 tahun	Internal
R3	Staf Keuangan (Pelaksana)	Verifikasi data transaksi dan laporan keuangan	4 tahun	Internal
R4	Pejabat Penyusun Laporan	Penyusunan dan pelaporan keuangan tahunan	8 tahun	Internal
R5	Auditor Internal (Inspektorat)	Pengawasan dan evaluasi laporan keuangan	12 tahun	Eksternal (pengawas)
R6	Auditor Eksternal (BPK Perwakilan)	Pemeriksaan kepatuhan dan kualitas laporan keuangan	15 tahun	Eksternal (pemeriksa)

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan di BAPPERIDA dilakukan melalui tahapan: perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, pengendalian internal, penyusunan laporan, serta evaluasi berkala. Namun, sebagian informan mengakui adanya kendala berupa keterlambatan pengumpulan data antar unit, keterbatasan SDM, serta variasi pemahaman terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

R1 menyampaikan:

“Pelaksanaan penatausahaan keuangan di BAPPERIDA sudah cukup baik, meski sering menghadapi kendala teknis, terutama dalam integrasi data antar unit kerja. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan.” (Hasil wawancara, 2025)

R2 menambahkan:

“Proses pencatatan transaksi sudah mengikuti prosedur, tetapi sering ada keterlambatan dalam verifikasi data sehingga laporan tidak selalu tepat waktu.” (Hasil wawancara, 2025)

Penatausahaan Keuangan Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019

Penelitian menemukan bahwa penyusunan laporan keuangan pada prinsipnya telah mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019, terutama dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, implementasi belum sepenuhnya konsisten. Informan R4 menyatakan:

“Kami berusaha patuh pada PP No. 12/2019, tetapi masih ada kendala terkait keterbatasan pemahaman teknis SAP oleh sebagian staf. Kesalahan klasifikasi akun masih kadang terjadi.” (Hasil wawancara, 2025)

R5 (auditor internal) menekankan perlunya penguatan pengendalian internal:

“Kualitas laporan sangat dipengaruhi oleh ketelitian dalam verifikasi. Masih perlu perbaikan dalam aspek internal control agar laporan lebih andal.” (Hasil wawancara, 2025)

Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil analisis, strategi utama yang direkomendasikan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan meliputi:

1. **Peningkatan kapasitas SDM** melalui pelatihan berkelanjutan terkait SAP dan regulasi terbaru.
2. **Pemanfaatan teknologi berbasis data** seperti SIPD untuk mempercepat pencatatan dan penyusunan laporan.
3. **Penguatan sistem pengendalian internal**, baik melalui regulasi internal maupun pengawasan lintas unit.
4. **Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja**, untuk mencegah keterlambatan pelaporan.
5. **Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan audit internal secara periodik** untuk memperbaiki proses penatausahaan.

R6 (auditor eksternal) menegaskan:

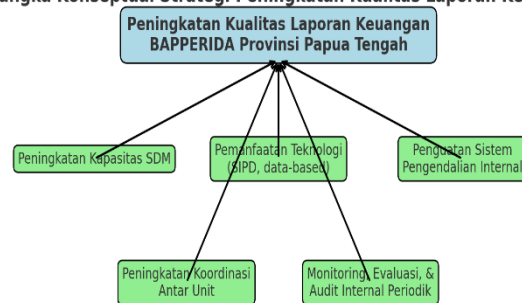
“Jika strategi-strategi ini dilaksanakan, laporan keuangan BAPPERIDA tidak hanya memenuhi standar akuntansi pemerintah, tetapi juga akan menjadi lebih tepat waktu, akurat, dan kredibel.” (Hasil wawancara, 2025)

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah sangat dipengaruhi oleh efektivitas penatausahaan keuangan, terutama dalam aspek koordinasi, kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi. Hal ini sejalan dengan penelitian Setiyawati & Doktorlina (2021) yang menemukan bahwa SDM, pengendalian internal, dan pemanfaatan TI merupakan faktor penentu kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu, penerapan SIPD dan digitalisasi keuangan daerah terbukti memperbaiki akurasi dan efisiensi pelaporan, meskipun tantangan infrastruktur dan budaya organisasi masih harus diatasi (Oktaviani et al., 2024).

Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah: (1) penatausahaan di BAPPERIDA sudah berjalan sesuai prosedur, namun terkendala keterbatasan SDM dan koordinasi antar unit; (2) penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada PP No. 12/2019, tetapi implementasinya belum konsisten; dan (3) strategi peningkatan kualitas laporan keuangan perlu difokuskan pada penguatan SDM, teknologi, pengendalian internal, serta monitoring yang berkesinambungan.

Kerangka Konseptual Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan



Sumber: Penulis (2025)

Gambar 2. Model Konseptual Hasil Penelitian

Berikut adalah **model kerangka konseptual hasil penelitian** dalam bentuk bagan. Diagram ini menggambarkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan di BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah dipengaruhi oleh lima strategi utama:

1. Peningkatan kapasitas SDM.

2. Pemanfaatan teknologi berbasis data (SIPD).
3. Penguatan sistem pengendalian internal.
4. Peningkatan koordinasi antar unit kerja.
5. Monitoring, evaluasi, dan audit internal periodik.

Semua faktor tersebut saling berkontribusi menuju kualitas laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan kredibel.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan di lingkungan BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah sangat ditentukan oleh efektivitas penatausahaan keuangan. Proses penatausahaan yang mencakup perencanaan, pencatatan, verifikasi, pengendalian internal, serta penyusunan laporan telah dilaksanakan sesuai regulasi, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas SDM dan koordinasi antar unit kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah menjadi acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan, terutama terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya konsisten, sehingga masih ditemukan kesenjangan antara teori dan praktik, misalnya keterlambatan pelaporan serta kesalahan klasifikasi akun.

Strategi yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di antaranya adalah penguatan kapasitas SDM bidang keuangan, pemanfaatan teknologi berbasis data seperti SIPD, penguatan pengendalian internal, perbaikan komunikasi antar unit kerja, serta penerapan monitoring dan evaluasi periodik. Dengan mengoptimalkan strategi ini, laporan keuangan tidak hanya patuh pada standar akuntansi pemerintah, tetapi juga semakin kredibel dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, khususnya BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah, untuk menjadikan tata kelola keuangan sebagai prioritas strategis dalam memperkuat akuntabilitas publik. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara penatausahaan keuangan dan kualitas laporan keuangan, khususnya dalam konteks daerah otonomi baru yang menghadapi tantangan transisi birokrasi.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif kecil serta fokus hanya pada satu instansi, yaitu BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah. Hal ini dapat membatasi generalisasi temuan ke konteks organisasi pemerintah daerah lain. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melibatkan lebih banyak instansi dan menggunakan pendekatan kombinasi kualitatif-kuantitatif (*mixed methods*) agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan kualitas laporan keuangan di sektor publik.

Implikasi Kebijakan

Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan penting, antara lain perlunya pemerintah daerah menetapkan program pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pengelola keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal berbasis risiko, serta mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui SIPD yang terintegrasi. Selain itu, pemerintah pusat dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional terkait peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah otonomi baru agar pengelolaan keuangan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Akinboade, O. A., & Kinfaek, E. C. (2020). Public financial management reforms and effectiveness: Evidence from developing economies. *Journal of Public Administration and Governance*, 10(4), 55–68.
<https://doi.org/10.5296/jpag.v10i4.17981>
- Arsal, M., Muryani, A., & Rahman, A. (2020). Determinants of the quality of local government financial reports in Indonesia. *Journal of Accounting Research*, 15(2), 112–124.
- Chandra, S., & Patel, R. (2022). Effectiveness of internal control systems in public sector organizations. *International Journal of Public Sector Management*, 35(7), 899–915. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-02-2022-0045>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE.
- Halik, J. B., Sasabone, L., Dezi, A., & Sipi, S.

- (2024). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga di Desa Sesean , Kabupaten Toraja Utara. *Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PADIMAS)*, 3(2), 51–56.
<https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/padimas/article/view/6554>
- Iyai, Y. E. M., Jaya, A., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kepatuhan dan Prosedur Verifikasi terhadap Kualitas Kinerja Pegawai di Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Tengah. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 32–42.
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/872>
- Jannah, F., Haliah, & Nirwana. (2025). The impact of digitalization on public sector financial reporting quality. *Social Science and Innovation Journal*, 2(1), 1–12.
<https://journal.midpublisher.com/index.php/ssij/article/view/156>
- Jouali, I., Jouali, K., & Diani, I. (2024). Determinants of financial reporting quality: Evidence from the public sector. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(8), 424. <https://doi.org/10.3390/jrfm18080424>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting* (17th ed.). Wiley.
- Kuipers, B. S. (2021). Organizational effectiveness in the public sector: A systems perspective. *Public Management Review*, 23(9), 1290–1307.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1718180>
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115.
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 2(1), 45–51.
<https://doi.org/10.63416/mrb.v2i1.226>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE.
- Oktaviani, R., Putra, D., & Sari, I. (2024). Implementation of SIPD in strengthening local government financial management. *Global Journal of Economics and Administration*, 2(2), 15–29.
<https://research.e-greenation.org/GIJEAA/article/view/337>
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6.
<https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Panggalo, A., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo : Peran Sistem LPSE Dalam Meningkatkan Proses Pengadaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 70–78.
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/992/824>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE.
- Prasetyo, N., Pasae, Y., & Lambe, K. H. P. (2025). Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memediasi Pengaruh Penatausahaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 108–119.
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/884/738>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2020). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson.
- Sahuleka, E. C., Sabandar, S. Y., & Pasae, Y. (2025). Analisis Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 165–172.
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/881>
- Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 86–92.

<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862>

- Setiyawati, H., & Doktoralina, C. M. (2021). The effect of human resources, internal control, and information technology on local government financial reporting quality. *International Journal of Economics and Business Administration*, 9(4), 112–124. <https://doi.org/10.35808/ijeba/611>
- Soeharto. (2022). *Akuntansi pemerintahan: Teori dan praktik terkini*. Rajawali Pers.
- Sutrisno. (2022). Pengelolaan keuangan daerah di era otonomi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 45–58.
- Tampang, G. I., Lambe, K. H. P., & Baharuddin, B. (2025). Pengaruh Pelatihan dan Pemanfaatan SIRUP terhadap Transparansi Pengadaan di Kabupaten Yahukimo Pendahuluan. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 1–11. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/977>
- Tandibua, S. T., Pasae, Y., & Baharuddin. (2025). Analisis Kinerja Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.294>